

# Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkalis

## Menurut Pengeluaran 2014 - 2018



# Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkalis

## Menurut Pengeluaran 2014 - 2018



*Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis*

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KABUPATEN BENGKALIS MENURUT PENGELUARAN  
2014-2018**

**ISBN** : -  
**Nomor Publikasi** : 14080.1903  
**Katalog BPS** : 9302023.1408  
**Ukuran Buku** : 21,0 x 29,7 cm  
**Jumlah Halaman** : x +76 halaman

**Naskah :**

**Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik**

**Gambar Kulit:**

**Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik**

**Diterbitkan Oleh:**

**© Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis**

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

## TIM PENULIS

Penanggung Jawab Umum : Sukarwanto, SST

Penyusun Naskah : Imelda Andriani, SST

Gambar Sampul : Imelda Andriani, SST

<https://bengkaliskab.bps.go.id>

## KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat peredaran uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu : Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), dan Ekspor Neto. Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan Tahun Dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*. Publikasi ini merupakan publikasi penyempurna dari tahun sebelumnya.

Kritik dan saran dari pengguna data sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi berikutnya. Kepada semua pihak yang turut memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini, kami mengucapkan terima kasih, semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat.

Bengkalis, September 2019

Kepala Badan Pusat Statistik

Kabupaten Bengkalis,



Sukarwanto



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Grafik .....	ix
Daftar Lampiran .....	x
Bab I. Pendahuluan .....	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB .....	7
Bab II. Metode Estimasi dan Sumber Data .....	13
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	15
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT .....	18
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah .....	20
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	23
2.5 Perubahan Inventori .....	25
2.6 Ekspor Impor .....	29
Bab III. Tinjauan Perekonomian Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Pengeluaran 2014-2018 .....	31
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran .....	33
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran .....	42
3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	42
3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT .....	46

3.2.3	Konsumsi Akhir Pemerintah.....	48
3.2.4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	50
3.2.5	Perubahan Inventori.....	51
3.2.6	Ekspor Barang dan Jasa.....	52
3.2.7	Impor Barang dan Jasa.....	54
Bab IV.	Perkembangan Agregat PDRB Kabupaten Bengkalis Menurut Pengeluaran 2014-2018.....	57
4.1	PDRB (Nominal).....	59
4.2	Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB.....	60
4.3	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i> .....	61
Bab V.	PENUTUP.....	63

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkulu 2014-2018	34
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkulu 2014-2018	35
Tabel 3	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkulu 2014 - 2018	37
Tabel 4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkulu 2014 - 2018	39
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkulu 2014 - 2018	41
Tabel 6	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkulu 2014 - 2018	41
Tabel 7	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Kabupaten Bengkulu 2014 - 2018	43
Tabel 8	Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Bengkulu 2014 - 2018	44
Tabel 9	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga di Kabupaten Bengkulu 2014 - 2018	45
Tabel 10	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bengkulu 2014 - 2018	46
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRK Kabupaten Bengkulu, 2014-2018	47
Tabel 12	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bengkulu, 2014-2018	49
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Bengkulu, 2014-2018	51
Tabel 14	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Bengkulu, 2014-2018	52

Tabel 15	Perkembangan Ekspor Kabupaten Bengkalis, 2014-2018	53
Tabel 16	Perkembangan Impor Kabupaten Bengkalis, 2014-2018	55
Tabel 17	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bengkalis, 2014-2018	59
Tabel 18	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Bengkalis, 2013-2017	61
Tabel 19	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> Kabupaten Bengkalis, 2014-2018	62

<https://bengkaliskab.bps.go.id>

## DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 1	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkalis 2014 - 2018	34
Grafik 2	PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkalis 2014 - 2018	36
Grafik 3	Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkalis 2014-2018	36
Grafik 4	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkalis 2014 - 2018	38
Grafik 5	Laju Pertumbuhan PDRB dan Laju Indeks Implisit Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkalis (persen), 2014 - 2018	40

## DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2014-2018	69
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2014-2018	70
Lampiran 3	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2018	71
Lampiran 4	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkulu ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2018	72
Lampiran 5	Sumber Pertumbuhan Produk Regional Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Menurut Pengeluaran (persen), 2014-2018	73
Lampiran 6	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Menurut Pengeluaran, 2014-2018	74
Lampiran 7	Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Menurut Pengeluaran, 2014-2018	75

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

<https://bengkaliskab.bps.go.id>



## 1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel *Input-Output*, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)<sup>1</sup>. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor.

---

<sup>1</sup>Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep<sup>2</sup> penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metode pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimasukkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi

---

<sup>2</sup>Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)

peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metode dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak memperlmasalahkannya adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat<sup>3</sup>, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “*output akhir (final output)*”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sebagai berikut :

---

3. - Yang dimaksud adalah Rumah Tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik  
- Disebut sebagai pendekatan “riil”  
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y ( <i>Income</i> )	= PDRB Produksi
C ( <i>Consumption</i> )	= Konsumsi akhir
GFCF ( <i>Gross Fixed Capital Formation</i> )	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
$\Delta$ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan diatas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah brutodari hasil penghitungan PDRBProduksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta  $\Delta$  Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antarwilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk

masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

## 1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

### Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

### Apa yang Dimaksud dengan SNA2008?

SNA2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan

konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

#### **Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?**

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

#### **Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?**

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

## Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh padapola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun<sup>4</sup>;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

## Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
  - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan

---

<sup>4</sup>SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
- b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
  - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
  - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
  - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
  - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya

pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

- h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari *output* industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metode FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metode ini menggantikan metode *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

**Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010**

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

# **BAB II**

## **METODE ESTIMASI**

### **DAN SUMBER DATA**

<https://belajarkaliskab.blogspot.in>



## 2.1 PENGELUARANKONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

### i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran<sup>1</sup>. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

### ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah Tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

### iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. *Furniture*, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin

---

<sup>1</sup>Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumah tangganya relatif lebih rendah

6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

#### **iv. Sumber Data**

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)

#### **v. Metode Estimasi**

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metode sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)

2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

## 2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NONPROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

### i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan dibawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

### ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

### iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai *output* non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat,

seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dan lainnya.

- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus, dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dan lainnya.

**iv. Sumber Data**

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS

**v. Metode Estimasi**

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar hargaBerlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

## 2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

### i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

### ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai *output* dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan

barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

### **iii. Cakupan**

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

### **iv. Sumber Data**

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan
- b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

**v. Metode Estimasi**

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \\ \text{Social transfer in kind purchased market production} + \\ \text{Output Bank Indonesia}$$

*Output* non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan:

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan beberapa deflator.

## 2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

### i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasidalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan;tumbuhan danternak;serta barang modal lainnya.

### ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupunbarang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain.Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

### iii Cakupan

PMTB mencakup:

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

### iv Sumber Data

- a. Data Eksplorasi Mineral
- b. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Kehutanan

### v Metode estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung tergantung ketersediaan data dimasing-masing daerah.

- ✓ Metode Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM +  
Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara *men-deflate* PMTB  
atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis  
barang modal.

✓ Metode Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total  
Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) =  
PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks  
Produksi (t)

## 2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

### i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan

data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

## **ii Konsep dan definisi**

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

### iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

### iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah:

1. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
2. Data komoditas perkebunan;

## V. Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau metode deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

### a. Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) - Volume inventori (t-1) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

### b. Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) - Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

## 2.6 EKSPOR - IMPOR

### i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

### ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antarresiden wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

### iii Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor keluar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

#### iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metode tidak langsung.

<https://bengkaliskab.bps.go.id>

# **BAB III**

## **TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BENGKALIS MENURUT PDRB PENGELUARAN 2014 -2018**

<http://www.bengkalis.kab.bps.go.id>



### 3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Bengkalis atas dasar harga berlaku (ADHB) di tahun 2018 meningkat sebesar 12,34 %, yakni dari 132.993.993,35 juta rupiah di tahun 2017 menjadi 149.406.574,57 juta rupiah di tahun 2018. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Jika dinilai atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 di tahun 2018, nilai PDRB ADHK sebesar 77.921.530,49 juta rupiah.

Selama periode 2014-2018, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkalis masih mengalami kontraksi, yakni masing-masing tahun sebesar (3,85)% tahun 2014; (2,74)% tahun 2015; (2,54)% tahun 2016; (1,71)% tahun 2017; dan (1,62)% tahun 2018. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Bengkalis digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan Pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori).

Pada periode tahun 2014-2018, PDRB Kabupaten Bengkalis atas dasar harga berlaku (ADHB) mengalami fluktuatif, yakni sebesar 165.899.036,63 juta rupiah (2014); 135.504.919,07 juta rupiah (2015); 132.200.503,50 juta rupiah (2016); 132.993.993,35 juta rupiah (2017); dan 149.406.574,57 juta rupiah (2018). Hal ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Nilai PDRB

menurut komponen pengeluaran Kabupaten Bengkulu pada periode 2014-2018 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini.

**Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkulu 2014 - 2018**

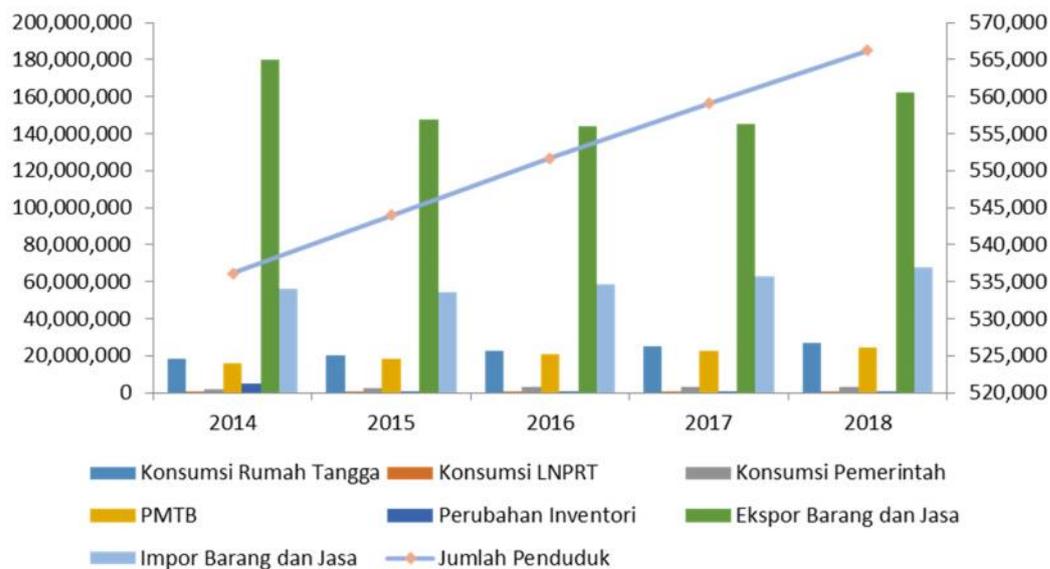
(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	18,245,931.38	20,436,847.92	22,795,442.71	24,847,827.89	27,012,325.50
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	218,234.72	232,388.56	255,991.61	281,815.55	317,633.94
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,175,678.06	2,544,727.34	2,905,652.01	3,020,466.58	3,121,959.85
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	16,081,621.05	18,540,222.43	20,724,107.13	22,549,150.99	24,276,538.50
5. Perubahan Inventori	5,054,895.43	357,590.80	455,277.83	117,768.01	158,135.04
6. Ekspor	178,235,762.56	145,457,343.18	141,472,274.38	142,396,310.20	159,393,034.86
7. Impor	54,113,086.67	52,064,201.17	56,408,242.17	60,219,345.88	64,873,053.12
<b>TOTAL PDRB</b>	<b>165,899,036.53</b>	<b>135,504,919.07</b>	<b>132,200,503.50</b>	<b>132,993,993.35</b>	<b>149,406,574.57</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Grafik 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkulu 2014 - 2018**



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Adapun nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Bengkalis pada periode 2014-2018 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini.

**Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkalis 2014- 2018**

*(Juta Rupiah)*

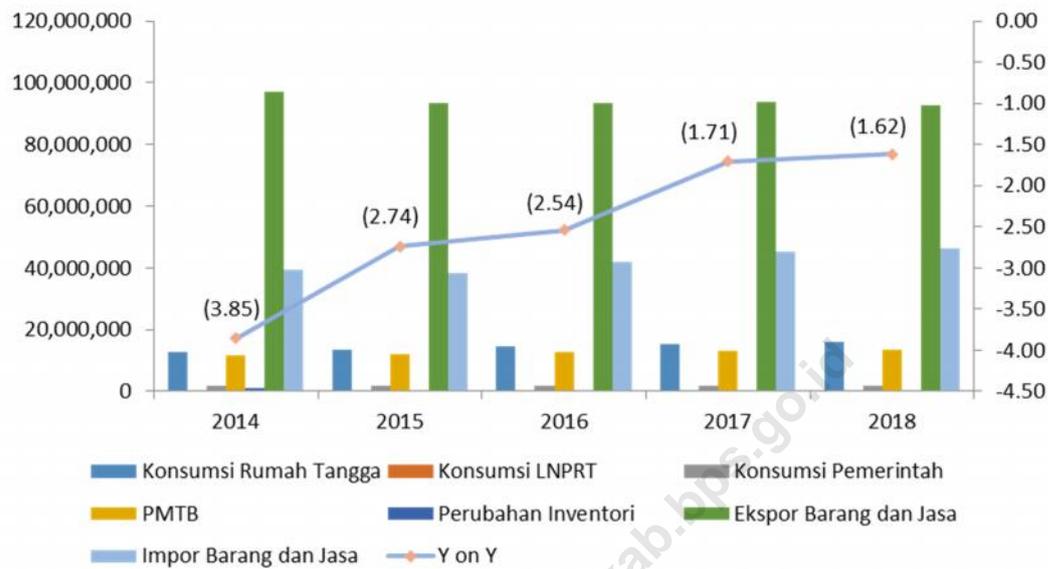
Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12,693,835.64	13,471,029.20	14,438,360.41	15,231,276.93	15,996,840.85
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	164,786.87	165,064.15	171,068.16	178,649.65	194,936.17
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,802,446.97	1,919,661.32	1,954,454.33	1,962,903.82	1,974,651.02
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11,728,949.46	12,108,800.14	12,596,332.68	13,041,217.96	13,358,003.03
5. Perubahan Inventori	978,875.31	93,283.17	90,177.49	69,036.31	57,752.78
6. Ekspor	96,973,339.11	93,251,525.17	93,322,830.34	93,827,410.16	92,552,265.64
7. Impor	39,338,436.63	38,332,688.85	41,995,231.86	45,108,567.57	46,212,919.01
<b>TOTAL PDRB</b>	<b>85,003,796.73</b>	<b>82,676,674.31</b>	<b>80,577,991.55</b>	<b>79,201,927.26</b>	<b>77,921,530.49</b>

\* Angka Sementara

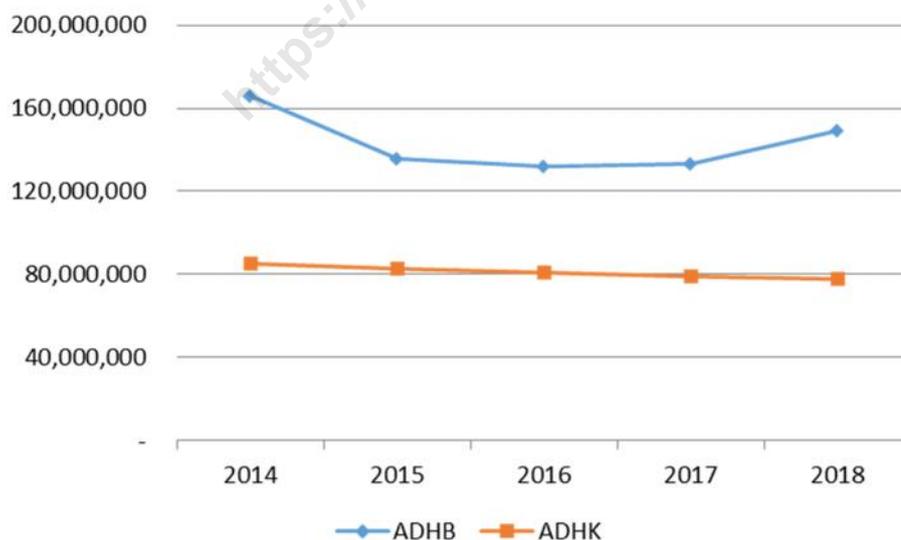
\*\* Angka Sangat Sementara

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Bengkalis menurun, yakni sebesar 85.003.796,73 juta rupiah (2014); 82.676.674,31 juta rupiah (2015); 80.577.991,55 juta rupiah (2016); 79.201.927,26 juta rupiah (2017); dan 77.921.530,49 juta rupiah (2018). Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkalis senantiasa berkontraksi (negatif) selama tahun 2014-2018.

**Grafik 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkulu 2014 - 2018**



**Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkulu 2014-2018**



Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat

dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus im- por barang dan jasa.

**Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkalis 2014 - 2018**

(%)					
Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	11.00	15.08	17.24	18.68	18.04
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0.13	0.17	0.19	0.21	0.21
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.31	1.88	2.28	2.41	2.26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.69	13.68	15.68	16.96	16.25
5. Perubahan Inventori	3.05	0.26	0.34	0.09	0.11
6. Ekspor	108.64	109.07	108.81	108.99	108.50
7. Impor	33.82	40.15	44.55	47.34	45.38
<b>PDRB</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

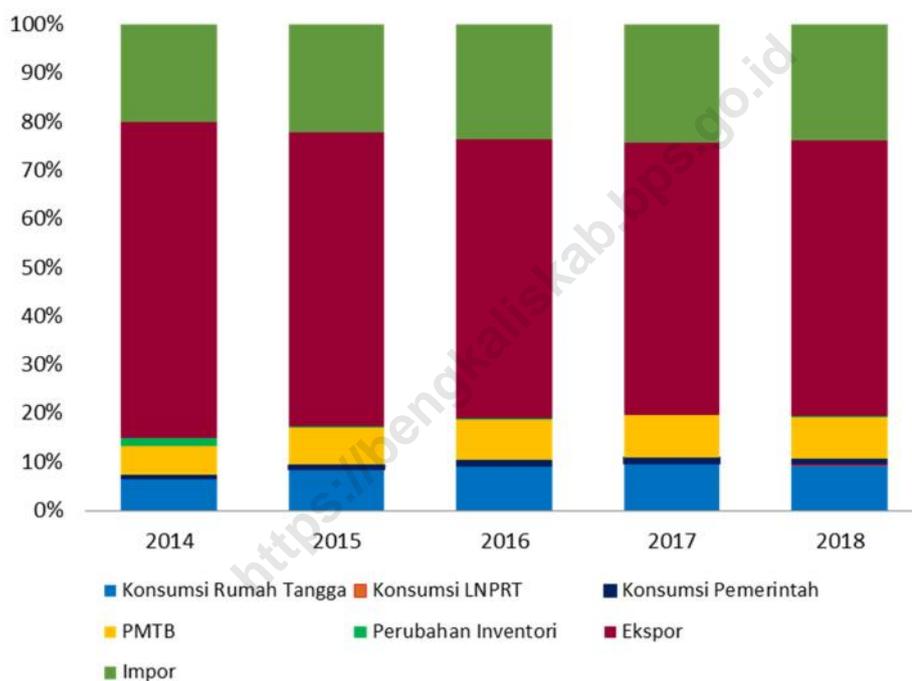
\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2014-2018, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik pada tahun 2018 sebesar 18,04 persen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. Ekspor Neto (Ekspor-Impor) paling dominan pada perekonomian di Bengkalis dengan memberikan kontribusinya sebesar 108,50 persen pada tahun 2018. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) pada tahun 2018 juga mempunyai kontribusi sebesar 16,25 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi

sekitar 100 s.d 108 persen, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 33 s.d 45 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

**Grafik 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkalis 2014 - 2018**



Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 1,31-2,26 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap menyerap produk domestik relatif kecil. Kegiatan perdagangan internasional Kabupaten Bengkalis pada tahun 2014-2018 yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih tinggi dari nilai impor. Perdagangan internasional Kabupaten Bengkalis pada periode ini berada pada posisi “surplus”. Namun, kontribusi net ekspor yang menurun

pada tahun 2017 mengindikasikan peran ekspor yang semula sangat dominan pada perekonomian perlahan mulai menurun kontribusinya.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2014 - 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis masih mengalami kontraksi, yakni sebesar (3,85) persen di tahun 2014; (2,74) persen di tahun 2015; (2,54) persen di tahun 2016; (1,71) persen di tahun 2017; dan (1,62) persen di tahun 2018. Sedangkan dari grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkalis 2014 - 2018**

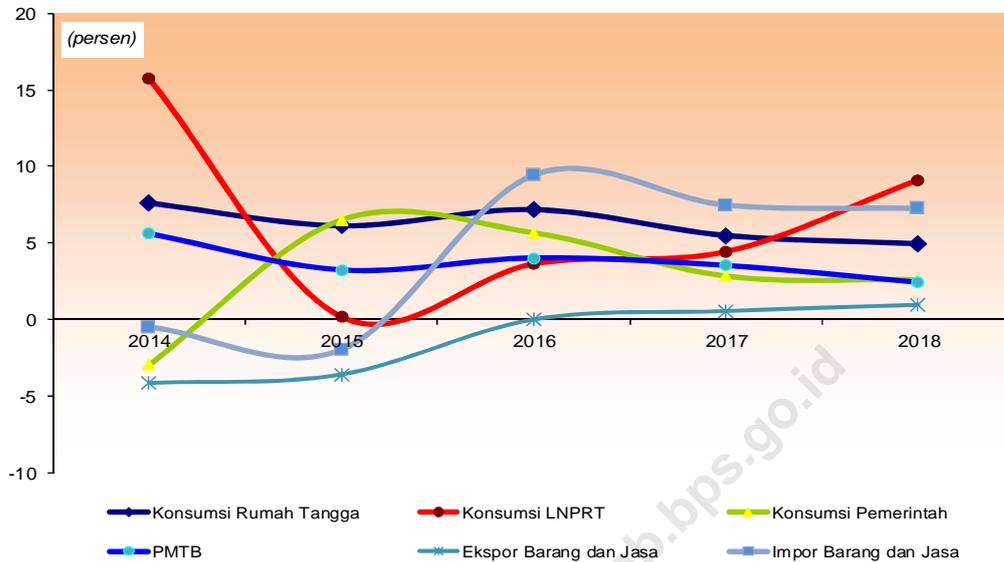
(%)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	7.60	6.12	7.18	5.49	4.95
2. Konsumsi LNPR	15.72	0.17	3.64	4.43	9.12
3. Konsumsi Pemerintah	(2.96)	6.50	5.66	2.83	2.60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.61	3.24	4.03	3.53	2.43
5. Ekspor	(4.16)	(3.59)	0.00	0.56	0.96
6. Impor	(0.49)	(1.96)	9.44	7.48	7.26
<b>TOTAL PDRB</b>	<b>(3.85)</b>	<b>(2.74)</b>	<b>(2.54)</b>	<b>(1.71)</b>	<b>(1.62)</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Grafik 5. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bengkalis, 2014 - 2018**



Indeks implisit<sup>1</sup> PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumahtangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari Tabel 5 berikut ini akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2014- 2018, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Perubahan harga untuk komponen PDRB pengeluaran dapat diukur dengan laju indeks implisit. Indeks implisit pada PDRB pengeluaran merupakan perbandingan antara komponen PDRB ADHB dengan ADHK 2010. Sementara itu, dari uraian dibawah ini (Tabel 6), dapat diketahui juga bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis masih digerakkan secara dominan oleh impor, lalu ekspor dan juga konsumsi rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh masih bergantungnya perekonomian Kabupaten Bengkalis pada impor.

<sup>1</sup> Indeks perkembangan

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran,  
Kabupaten Bengkulu 2014 - 2018**

(%)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	143.74	151.71	157.88	163.14	168.59
2. Konsumsi LNPR	132.43	140.79	149.64	157.75	162.94
3. Konsumsi Pemerintah	120.71	132.56	148.67	153.88	158.10
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	137.11	153.11	164.52	172.91	181.74
5. Ekspor	185.30	157.61	153.41	153.72	170.29
6. Impor	141.59	140.02	138.52	137.77	138.32
<b>TOTAL PDRB</b>	<b>195.17</b>	<b>163.90</b>	<b>164.07</b>	<b>167.92</b>	<b>191.74</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran,  
Kabupaten Bengkulu 2014 - 2018**

(%)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.01	0.91	1.17	0.98	0.95
2. Konsumsi LNPR	0.03	0.00	0.01	0.01	0.02
3. Konsumsi Pemerintah	(0.06)	0.14	0.13	0.07	0.07
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0.70	0.45	0.59	0.55	0.40
5. Ekspor	(4.77)	(4.11)	0.00	0.65	1.14
6. Impor	(0.22)	(0.92)	4.43	3.94	4.19
<b>TOTAL PDRB</b>	<b>(3.85)</b>	<b>(2.74)</b>	<b>(2.54)</b>	<b>(1.71)</b>	<b>(1.62)</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

## 3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Bengkalis untuk periode 2014 - 2018.

### 3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Pada Tabel 7 berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2014 - 2018 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya

kenaikkan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

**Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga,  
Kabupaten Bengkalis 2014 - 2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB ( <i>Juta Rp</i> )	18,245,931.38	20,436,847.92	22,795,442.71	24,847,827.89	27,012,325.50
b. ADHK 2010 ( <i>Juta Rp</i> )	12,693,835.64	13,471,029.20	14,438,360.41	15,231,276.93	15,996,840.85
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	11.00	15.08	17.24	18.68	18.04
Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun ( <i>Juta Rp</i> )					
a. ADHB	34.03	37.57	41.32	44.44	47.71
b. ADHK 2010	23.68	24.76	26.17	27.24	28.25
Pertumbuhan					
a. Total Konsumsi RT	17.07	12.01	11.54	9.00	8.71
b. Perkapita	5.95	4.59	5.69	4.10	3.70
Jumlah penduduk ( <i>orang</i> )	536,138	543,987	551,683	559,081	566,228

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Kontribusi tertinggi pada tahun 2017 yaitu 18,68 persen dan terendah pada tahun 2014 sebesar 11 persen. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara rata-rata, konsumsi per kapita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2014, secara umum setiap orang di Kabupaten Bengkalis akan mengeluarkan biaya untuk konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun nonmakanan (sandang, perumahan, pendidikan, dan sebagainya) sebesar 34,03 juta rupiah setahun. Pengeluaran ini terus meningkat

menjadi 37,57 juta rupiah (2015); 41,32 juta rupiah (2016); 44,44 juta rupiah (2017) dan 47,71 juta rupiah (2018).

Rata-rata konsumsi rumah tangga selama tahun 2014-2018, tumbuh pada rata-rata 11,67 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 17,07 persen. Di sisi lain, pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2018 terjadi penurunan rata-rata konsumsi per kapita sebesar 3,70 persen, artinya pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

**Tabel 8. Struktur Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Bengkalis 2014 – 2018<sup>2</sup>**

	(%)				
Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan dan Minuman, dan Rokok	42.33	43.25	44.65	45.35	48.58
b. Pakaian dan Alas Kaki	3.44	3.47	3.57	3.64	3.65
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan Rumah Tangga	9.12	9.08	9.22	9.39	9.22
d. Kesehatan dan Pendidikan	5.76	5.70	5.80	5.81	5.38
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	34.02	33.20	31.53	30.59	28.32
f. Hotel dan Restoran	2.75	2.78	2.73	2.76	2.56
g. Lainnya	2.58	2.51	2.50	2.46	2.29
Total Konsumsi	100	100	100	100	100

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Secara rata-rata, struktur konsumsi akhir rumah tangga selama tahun 2014-2018 didominasi oleh kelompok makanan dan minuman. Proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan sekitar 42-48 persen pada tahun 2014-2018. Demikian sebaliknya, kontribusi konsumsi bukan makanan cenderung

<sup>2</sup>Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

menurun. Sekitar 30 persen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga digunakan untuk transportasi dan komunikasi.

Pengeluaran bukan makanan mencakup biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi. Pergeseran pola proporsi konsumsi antara kelompok makanan dan kelompok bukan makanan menunjukkan adanya tarik menarik kebutuhan rumah tangga atas makanan dan bukan makanan masih cukup kuat.

**Tabel 9. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga di Kabupaten Bengkalis 2014 – 2018**

(%)					
Kelompok Konsumsi	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman dan Rokok	6.93	8.30	8.91	6.09	8.20
b. Pakaian dan Alas Kaki	9.83	6.87	8.90	6.80	0.54
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan Rumah Tangga	8.55	6.57	7.61	6.30	2.67
d. Kesehatan dan Pendidikan	8.87	6.00	7.32	4.13	3.81
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	7.05	2.88	4.26	4.60	1.70
f. Hotel dan Restoran	8.85	7.69	7.37	4.84	2.51
g. Lainnya	13.99	6.50	8.66	5.11	6.69
<b>Konsumsi Akhir Rumah Tangga</b>	<b>7.60</b>	<b>6.12</b>	<b>7.18</b>	<b>5.49</b>	<b>4.95</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Dilihat dari pertumbuhan riil-nya, pengeluaran rumah tangga tahun 2014-2018 baik untuk kelompok makanan maupun bukan makanan menunjukkan pertumbuhan yang positif dan berfluktuasi (lihat tabel 9). Pertumbuhan *riil* ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantitas (volume) dari waktu ke waktu. Pertumbuhan *riil* pengeluaran rumah tangga pada tahun 2014-2018 berada pada rentang 4 hingga 7 persen. Pertumbuhan riil ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke

waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya penurunan kemakmuran masyarakat.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 10. Pada tabel ini menunjukkan Pertumbuhan indeks implisit berfluktuasi untuk setiap tahunnya pada setiap kelompok konsumsi. Pertumbuhan indeks implisit tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 8,80 persen. Sejalan dengan semakin stabilnya harga dalam 2 tahun terakhir, pertumbuhan indeks implisit menunjukkan angka yang semakin kecil.

**Tabel 10. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bengkalis 2014 – 2018<sup>3</sup>**

(%)					
Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman dan Rokok	9.01	5.68	5.71	4.36	7.38
b. Pakaian dan Alas Kaki	8.45	5.59	5.28	4.09	8.27
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan Rumah Tangga	9.98	4.74	5.20	4.44	3.66
d. Kesehatan dan Pendidikan	12.64	4.53	5.82	4.91	(3.25)
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	8.24	6.24	1.61	1.09	(1.27)
f. Hotel dan Restoran	10.23	5.31	2.10	5.03	(1.81)
g. Lainnya	1.51	2.43	2.16	2.15	(5.58)
<b>Konsumsi Akhir Rumah Tangga</b>	<b>8.80</b>	<b>5.55</b>	<b>4.07</b>	<b>3.33</b>	<b>3.34</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

### 3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam

<sup>3</sup>Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB )

kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Bengkalis, 2014-2018**

(%)

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB ( <i>Juta Rp</i> )	218,234.72	232,388.56	255,991.61	281,815.55	317,633.94
b. ADHK 2010 ( <i>Juta Rp</i> )	164,786.87	165,064.15	171,068.16	178,649.65	194,936.17
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0.13	0.17	0.19	0.21	0.21
Pertumbuhan Riil Total Konsumsi LNPRT (%)	15.72	0.17	3.64	4.43	9.12

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Dari berbagai komponen penyusun pembentuk PDRB menurut pengeluaran, konsumsi LNPRT memiliki peran yang relatif kecil terhadap PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Bengkalis. Dibandingkan dengan komponen lainnya pada PDRB menurut pengeluaran, komponen ini memiliki besaran dan kontribusi yang jauh lebih kecil, namun menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Mengingat peranan komponen LNPRT ini ditengah-tengah masyarakat cukup besar, perlu adanya perhatian dan pembinaan dari pemerintah maupun non pemerintah untuk dapat mengembangkan kegiatan LNPRT ini. Sehingga dapat memberikan peningkatan kontribusi pada total PDRB. Selama periode 2014-2018, kontribusinya masih berada dibawah 1 persen.

Dalam empat tahun terakhir, LNPRT menunjukkan peningkatan pertumbuhan. Pertumbuhan LNPRT tahun 2015 sebesar 0,17 persen, 3,64 persen ditahun 2016, 4,43 persen di tahun 2017 dan meningkat hingga 9,12 persen ditahun 2019. Angka ini diprediksi terus meningkat sejalan fenomena

yang biasanya terjadi pada tahun politik, seperti pilgubri tahun 2018 dan persiapan pilpres tahun 2019.

### 3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian. Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Bengkalis serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan pada tabel 12.

**Tabel 12. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bengkalis, 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB ( <i>Juta Rp</i> )	2,175,678.06	2,544,727.34	3,015,528.16	3,209,592.98	3,383,395.36
b. ADHK 2010 ( <i>Juta Rp</i> )	1,802,446.97	1,919,661.32	2,028,361.29	2,085,810.97	2,140,009.94
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1.31	1.88	2.28	2.41	2.26
Pertumbuhan Riil Total Konsumsi Pemerintah (%)	-2.96	6.50	5.66	2.83	2.60

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah cenderung meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2014 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 2.175.678,06 juta rupiah, kemudian pada tahun 2018 meningkat sebesar 3.383.395,36 juta rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat dari 1,31 persen (tahun 2014) menjadi 2,26 persen (tahun 2018). Sepanjang periode tersebut, kontribusi terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 1,31 persen sedangkan kontribusi tertinggi pada tahun 2017 sebesar 2,41.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

### 3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)<sup>4</sup>. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga memiliki proporsi sekitar 9-16 persen terhadap total PDRB dan menunjukkan peningkatan secara nominal maupun riil (lihat tabel 13). Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (enam) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2014 - 2018 berfluktuatif setiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 5,61 persen dan terendah pada tahun 2018 sebesar 2,43 persen.

Pertumbuhan PMTB pada masing-masing sub komponen sangat bervariasi. Sub komponen bangunan merupakan sub komponen dengan kontribusi terbesar dalam pembentukan PMTB, yaitu sekitar 56 persen. Pertumbuhan yang terjadi pada sub komponen bangunan disebabkan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah untuk belanja modal khususnya untuk pembangunan gedung dan infrastruktur di Kabupaten Bengkalis. Sementara pada sub komponen nonbangunan, dengan rata-rata kontribusinya sebesar 47 persen. Jika dilihat pertumbuhannya, baik subkomponen bangunan dan non bangunan menunjukkan pertumbuhan yang positif.

---

<sup>4</sup> Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB  
Kabupaten Bengkalis, 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB ( <i>Juta Rp</i> )	16,081,621.05	18,540,222.43	20,724,107.13	22,549,150.99	24,276,538.50
b. ADHK 2010 ( <i>Juta Rp</i> )	11,728,949.46	12,108,800.14	12,596,332.68	13,041,217.96	13,358,003.03
Proporsi terhadap PDRB (%)	9.69	13.68	15.68	16.96	16.25
Struktur PMTB					
a. Bangunan ( <i>Juta Rp</i> )	9,297,534.14	10,545,917.87	11,586,794.63	12,418,435.53	13,536,481.45
(%)	57.81	56.88	55.91	55.07	55.76
b. Non Bangunan ( <i>Juta Rp</i> )	6,784,086.92	7,994,304.56	9,137,312.50	10,130,715.46	10,740,057.05
(%)	42.19	43.12	44.09	44.93	44.24
Total PMTB ( <i>Juta Rp</i> )	16,081,621.05	18,540,222.43	20,724,107.13	22,549,150.99	24,276,538.50
(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Pertumbuhan (%)	5.61	3.24	4.03	3.53	2.43
a. Bangunan	6.96	3.84	3.25	4.01	3.18
b. Non Bangunan	4.02	2.51	4.98	2.95	1.51

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

### 3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan.

Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori  
Kabupaten Bengkalis, 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB ( <i>Juta Rp</i> )	5,054,895.43	357,590.80	455,277.83	117,768.01	167,586.58
b. ADHK 2010 ( <i>Juta Rp</i> )	978,875.31	93,283.17	90,177.49	69,036.31	61,204.60
Proporsi terhadap PDRB (%)	3.05	0.26	0.34	0.09	0.11

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Perubahan inventori di Bengkalis juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Selama kurun waktu 2014 sampai dengan 2018, perubahan inventori dengan kontribusi terbesar terdapat pada tahun 2014 sebesar 3,05 persen terhadap total PDRB dan terendah pada tahun 2016 sebesar 0,09 persen. Pada tahun 2014 perubahan inventori cukup tinggi dikarenakan adanya peningkatan stok CPO akibat tekanan dari pasar internasional.

### 3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Bengkalis tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah

lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 15. Perkembangan Ekspor Kabupaten Bengkalis, 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Juta Rp)	180,236,200.87	147,794,857.56	143,852,973.51	144,946,379.75	162,109,430.63
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	97,266,378.28	93,771,629.71	93,773,175.52	94,293,779.62	95,197,201.75
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	108.64	109.07	108.81	108.99	108.50
Pertumbuhan Riil Ekspor	(4.16)	(3.59)	0.00	0.56	0.96

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Ekspor Kabupaten Bengkalis sangat dominan secara nilai maupun kontribusinya terhadap total nilai PDRB. Meski nilai nominal ekspor cukup berfluktuatif, pada tahun 2018 mempunyai kontribusi sebesar 108,50 persen. Besarnya angka kontribusi ini menunjukkan hampir seluruh produk yang diproduksi di Kabupaten Bengkalis digunakan untuk memenuhi permintaan ekspor atau diperdagangkan ke luar wilayah Kabupaten Bengkalis. Komoditi ekspor Kabupaten Bengkalis didominasi oleh ekspor migas yaitu CPO (Crude Palm Oil).

Pertumbuhan riil total ekspor mengalami kontraksi, khususnya pada tahun 2014 dan 2015 dengan masing-masing tahun menurun sebesar 4,16 persen dan 3,59 persen. Pertumbuhan yang minus tersebut disebabkan terkait adanya komoditi ekspor Bengkalis yang didominasi oleh ekspor minyak bumi baik minyak mentah maupun hasil minyak mengalami penurunan produksi semenjak tahun 2012 hingga 2015, sehingga menyebabkan ekspor secara keseluruhan juga

mengalami penurunan. Sementara itu, pada tahun lainnya, pertumbuhan ekspor pada masing-masing tahun masih berada dibawah 1 persen.

### 3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Bengkalis. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Bengkalis di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Kabupaten Bengkalis terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kabupaten Bengkalis cenderung mengalami fluktuatif (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) pada kurun tahun 2014 s.d 2018. Begitu pula pada pertumbuhan riil impor yang juga mengalami pertumbuhan yang fluktuatif pada tahun 2014-2018. Khusus pada tahun 2014

dan 2015, pertumbuhan riil impor mengalami kontraksi masing-masing sebesar 0,49 persen dan 1,96 persen. Pertumbuhan tertinggi sebesar 9,44 persen pada tahun 2016, kemudian menurun pada tahun 2017 sebesar 7,48 persen dan kembali mejurun pada tahun 2018.

Untuk kontribusi impor barang dan jasa, selama periode 2014-2018 menunjukkan kontribusi yang cenderung meningkat. Pada tahun 2014, memberikan kontribusi sebesar 33,82 persen kemudian meningkat hingga 45,38 persen pada tahun 2018.

**Tabel 16. Perkembangan Impor Kabupaten Bengkalis, 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB ( <i>Juta Rp</i> )	56,113,524.98	54,401,715.55	58,898,817.45	62,958,541.83	67,796,644.21
b. ADHK 2010 ( <i>Juta Rp</i> )	39,631,475.80	38,852,793.39	42,519,484.01	45,697,844.18	49,014,910.69
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	33.82	40.15	44.55	47.34	45.38
Pertumbuhan Riil impor	(0.49)	(1.96)	9.44	7.48	7.26

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara



# **BAB IV**

## **PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN BENGKALIS 2014 - 2018**

<https://bengkalis.kab.go.id>



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis.

#### 4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Bengkalis di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

**Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bengkalis, 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB ( <i>Juta Rp</i> )					
- ADHB	165,899,036.53	135,504,919.07	132,200,503.50	132,993,993.35	149,406,574.57
- ADHK 2010	85,003,796.73	82,676,674.31	80,577,991.55	79,201,927.26	77,921,530.49
PDRB Perkapita ( <i>Juta Rp</i> )					
- ADHB	309.43	249.10	239.63	237.88	263.86
- ADHK 2010	158.55	151.98	146.06	141.66	137.62
Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK 2010	(5.33)	(4.14)	(3.90)	(3.01)	(2.86)
Jumlah penduduk ( <i>orang</i> )	536,138	543,987	551,683	559,081	566,228

\* *Angka Sementara*

\*\* *Angka Sangat Sementara*

PDRB per-kapita Kabupaten Bengkalis menunjukkan data yang berfluktuatif dari tahun ke tahun (tabel 17). Pada tahun 2018, PDRB perkapita Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 263,48 juta rupiah. Secara rata-rata setiap penduduk Kabupaten Bengkalis mampu menciptakan nilai tambah sebesar 263,48 juta rupiah pada tahun 2018.

Untuk pertumbuhan perkapita secara riil selama lima tahun terakhir, dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB perkapita mengalami peningkatan, di sisi lain, perkembangan ekonomi terjadi diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk yang meningkat rata-rata di bawah 1 persen dan cenderung menurun tiap tahunnya, atau lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan perkapita. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan perkapita tersebut tidak saja terjadi secara riil tetapi juga secara kualitas.

## **4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB**

Konsumsi akhir merupakan penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, lembaga non profit (LNPR), dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Barang dan jasa yang berada di wilayah domestik yang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat dengan rata-rata 16 persen (Tabel 18). Disisi lain, produk yang digunakan untuk selain konsumsi akhir, baik untuk PMTB maupun net ekspor, meski cukup besar dengan rata-rata 84 persen, namun memiliki kecenderungan menurun. Untuk itu, perlu upaya yang lebih untuk meningkatkan peran PMTB maupun net ekspor sebagai instrumen penggerak perekonomian.

**Tabel 18. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB  
Kabupaten Bengkalis, 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB)					
<i>(Juta Rp)</i>					
a. Rumah tangga	18,245,931.38	20,436,847.92	22,795,442.71	24,847,827.89	26,948,633.77
b. LNPR	218,234.72	232,388.56	255,991.61	281,815.55	317,633.94
c. Pemerintah	2,175,678.06	2,544,727.34	3,015,528.16	3,209,592.98	3,383,395.36
J u m l a h	20,639,844.16	23,213,963.83	26,066,962.48	28,339,236.42	30,649,663.07
PDRB (ADHB)	165,899,036.53	135,504,919.07	132,200,503.50	132,993,993.35	149,406,574.57
<i>(Juta Rp)</i>					
Proporsi ( <i>persen</i> )	12.44	17.13	19.72	21.31	20.51
* Angka Sementara					
** Angka Sangat Sementara					

### 4.3 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan

juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana:  $I_t$  = PMTB tahun ke t

$Y_t$  = Output tahun ke t

$Y_{t-1}$  = Output tahun ke t-1

**Tabel 19. Incremental Capital Output Ratio  
Kabupaten Bengkalis, 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Juta Rupiah)	85,003,796.73	82,676,674.31	80,577,991.55	79,201,927.26	77,921,530.49
Perubahan (Juta Rupiah)	(3,407,288.85)	(2,327,122.43)	(2,098,682.76)	(1,376,064.29)	(1,280,396.77)
PMTB (ADHK 2010) (Juta Rupiah)	11,728,949.46	12,108,800.14	12,596,332.68	13,041,217.96	13,358,003.03
<b>ICOR</b>	<b>(3.44)</b>	<b>(5.20)</b>	<b>(6.00)</b>	<b>(9.48)</b>	<b>(10.43)</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Pada tabel diatas, diketahui bahwa koefisien ICOR bernilai negative. Hal ini dapat terjadi apabila output pada tahun penghitungan lebih kecil daripada tahun sebelumnya, yang disebabkan karena adanya penurunan produksi migas dan belum ditemukannya sumur minyak yang baru. Dengan demikian, koefisien ICOR yang negative dapat diartikan bahwa investasi (penanaman barang modal) baru belum menghasilkan output dengan optimal pada tahun tersebut.

# **BAB V**

## **PENUTUP**

<https://bengkalis.kab.bps.go.id/>



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2014 s.d 2018 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Bengkalis pada periode bersangkutan. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2014 s.d 2018, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Berdasarkan hasil analisis komponen PDRB menurut pengeluaran dapat diidentifikasi bahwa di Kabupaten Bengkalis, produk yang digunakan untuk selain konsumsi akhir (PMTB atau net ekspor) di Kabupaten Bengkalis memiliki peranan yang cukup besar.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Bengkalis terhadap ekonomi luar daerah.



# LAMPIRAN

<https://bengkalis.kab.bps.go.id/>



**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkalis Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2014-2018**

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	18,245,931.38	20,436,847.92	22,795,442.71	24,847,827.89	26,948,633.77
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	218,234.72	232,388.56	255,991.61	281,815.55	317,633.94
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,175,678.06	2,544,727.34	3,015,528.16	3,209,592.98	3,383,395.36
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	16,081,621.05	18,540,222.43	20,724,107.13	22,549,150.99	24,276,538.50
5. Perubahan Inventori	5,054,895.43	357,590.80	455,277.83	117,768.01	167,586.58
6. Ekspor	180,236,200.87	147,794,857.56	143,852,973.51	144,946,379.75	162,109,430.63
7. Impor	56,113,524.98	54,401,715.55	58,898,817.45	62,958,541.83	67,796,644.21
<b>P D R B</b>	<b>165,899,036.53</b>	<b>135,504,919.07</b>	<b>132,200,503.50</b>	<b>132,993,993.35</b>	<b>149,406,574.57</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkalis Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)  
Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12,693,835.64	13,471,029.20	14,438,360.41	15,231,276.93	15,985,085.68
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	164,786.87	165,064.15	171,068.16	178,649.65	194,936.17
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,802,446.97	1,919,661.32	2,028,361.29	2,085,810.97	2,140,009.94
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11,728,949.46	12,108,800.14	12,596,332.68	13,041,217.96	13,358,003.03
5. Perubahan Inventori	978,875.31	93,283.17	90,177.49	69,036.31	61,204.60
6. Ekspor	97,266,378.28	93,771,629.71	93,773,175.52	94,293,779.62	95,197,201.75
7. Impor	39,631,475.80	38,852,793.39	42,519,484.01	45,697,844.18	49,014,910.69
<b>P D R B</b>	<b>85,003,796.73</b>	<b>82,676,674.31</b>	<b>80,577,991.55</b>	<b>79,201,927.26</b>	<b>77,921,530.49</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Lampiran 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkalis  
Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2018**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>	<b>2018**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	11.00	15.08	17.24	18.68	18.04
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0.13	0.17	0.19	0.21	0.21
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.31	1.88	2.28	2.41	2.26
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.69	13.68	15.68	16.96	16.25
5. Perubahan Inventori	3.05	0.26	0.34	0.09	0.11
6. Ekspor	108.64	109.07	108.81	108.99	108.50
7. Impor	33.82	40.15	44.55	47.34	45.38
<b>P D R B</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten  
Bengkalis Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2018**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>	<b>2018**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7.60	6.12	7.18	5.49	4.95
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	15.72	0.17	3.64	4.43	9.12
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(2.96)	6.50	5.66	2.83	2.60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.61	3.24	4.03	3.53	2.43
5. Ekspor	(4.16)	(3.59)	0.00	0.56	0.96
6. Impor	(0.49)	(1.96)	9.44	7.48	7.26
<b>P D R B</b>	<b>(3.85)</b>	<b>(2.74)</b>	<b>(2.54)</b>	<b>(1.71)</b>	<b>(1.62)</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Lampiran 5. Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
Kabupaten Bengkulu Menurut Pengeluaran (Persen), 2014-2018**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>	<b>2018**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.01	0.91	1.17	0.98	0.95
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0.03	0.00	0.01	0.01	0.02
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(0.06)	0.14	0.13	0.07	0.07
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0.70	0.45	0.59	0.55	0.40
5. Ekspor	(4.77)	(4.11)	0.00	0.65	1.14
6. Impor	(0.22)	(0.92)	4.43	3.94	4.19
<b>P D R B</b>	<b>(3.85)</b>	<b>(2.74)</b>	<b>(2.54)</b>	<b>(1.71)</b>	<b>(1.62)</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Lampiran 6. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu  
Menurut Pengeluaran, 2014-2018**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>	<b>2018**</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	143.74	151.71	157.88	163.14	168.59
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	132.43	140.79	149.64	157.75	162.94
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	120.71	132.56	148.67	153.88	158.10
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	137.11	153.11	164.52	172.91	181.74
5. Ekspor	185.30	157.61	153.41	153.72	170.29
6. Impor	141.59	140.02	138.52	137.77	138.32
<b>P D R B</b>	<b>195.17</b>	<b>163.90</b>	<b>164.07</b>	<b>167.92</b>	<b>191.74</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Lampiran 7. Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto  
(PDRB) Kabupaten Bengkalis Menurut Pengeluaran, 2014-2018**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>	<b>2018**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.80	5.55	4.07	3.33	3.34
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRRT	4.76	6.31	6.29	5.42	3.29
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(0.53)	9.82	12.15	3.50	2.75
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10.72	11.67	7.45	5.09	5.11
5. Ekspor	11.57	(14.94)	(2.67)	0.20	10.78
6. Impor	8.39	(1.11)	(1.07)	(0.54)	0.40
<b>P D R B</b>	<b>10.17</b>	<b>(16.02)</b>	<b>0.10</b>	<b>2.35</b>	<b>14.19</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara





Sensus  
Penduduk  
2020

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

*- Enlighten The Nations -*



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS  
Jl. Antara no. 439 Bengkalis - Riau  
Website: [bengkaliskab.bps.go.id](http://bengkaliskab.bps.go.id)  
Email: [bps1408@bps.go.id](mailto:bps1408@bps.go.id)